

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Kinerja perusahaan berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Kasus hancurnya beberapa perusahaan dikarenakan kondisi kinerja keuangan yang buruk sudah dibuktikan di berbagai negara dengan berbagai kondisi ekonomi.

Kondisi bisnis di Indonesia adalah bisnis terkonsentrasi dengan didominasi oleh perusahaan keluarga. Pada sejarah kasus Sinar Mas Group dengan model bisnis keluarga yang ada di Indonesia dapat dijadikan contoh hancurnya kinerja perusahaan hingga tidak dapat memenuhi likuidasi. Bisnis Sinar Mas Group didirikan pada tahun 1969 dengan mengawali dengan membangun pabrik minyak goreng kemudian melakukan diversifikasi secara bertahap ke minyak kelapa sawit, kertas dan jasa keuangan. Pada tahun 1999, Pemerintah mengkapitalisasi bank *listing* di Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Group yang telah memiliki 89% dari sahamnya yaitu Bank International Indonesia. Setelah bank tersebut mengalami kredit macet dan bangkrut. Pada tahun 2001, Asia Pulp & Paper (APP), yang merupakan bagian dari Sinar Mas Group yang telah *listing* di New York Stock Exchange, gagal membayar hutang sebesar 13.4 miliar USD. Firma Audit KPMG kemudian melaporkan banyak transaksi terkait Sinar Mas Group yang tidak sesuai dengan standar. Pada tahun 2001, dua anak perusahaan memperbarui perjanjian pembelian kayu pulp dengan anak perusahaan lainnya

dengan harga yang tidak wajar yaitu harga yang disepakati tidak sesuai dengan biaya produksi.

Kasus lain mengenai transaksi pihak-pihak berelasi juga ditemukan di Taiwan. Pada Januari 2017, pemerintan Taiwan mengambil alih bank swasta yang bangkrut dan perusahaan keuangan yang juga bangkrut setelah dua perusahaan *listing* yang dikendalikan oleh pihak mayoritas yaitu Rebar Group oleh perusahaan keluarga Wang menyatakan bangkrut.

Kinerja keuangan sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya *related party transaction* atau transaksi pihak berelasi. Kasus hancurnya berbagai perusahaan dengan karakteristik perusahaan keluarga kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan transaksi yang dilakukan antar relasi. Transaksi pihak berelasi akan cenderung dilakukan oleh pemilik pengendali dengan memanfaatkan relasinya kemudian aktivitas tersebut dilakukan untuk mengekspropriasi, yaitu memindahkan aktiva pemilik non-pengendali. Hal ini akan menurunkan kinerja perusahaan karena transaksi ini tidak didasarkan pada alasan ekonomi.

Penelitian mengenai pengaruh transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan sudah dilakukan di berbagai negara namun masih jarang ditemukan di Indonesia mengingat transaksi ini banyak ditemukan di negara dengan karakteristik bisnis keluarga. Jika dilihat antara penelitian yang dilakukan di negara lain dan penelitian yang dilakukan di Indonesia akan menghasilkan temuan yang berbeda. Dalam penelitian di China, Taiwan, Hongkong membuktikan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba dan *tunneling*. Namun, di Indonesia temuan menunjukkan sebaliknya, dalam penelitian Kuan *et al.*

(2010) menemukan bahwa tidak ada indikasi bahwa manajemen laba berhubungan dengan transaksi pihak-pihak berelasi. Penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Restuti (2015) juga membuktikan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi tidak berhubungan dengan manajemen laba dan *tunneling*. Sebagian besar penelitian juga belum menemukan secara jelas bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang memungkinkan transaksi tersebut dilakukan sebagai sarana manajemen laba.

Isu mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai relasi atau disebut juga transaksi dengan pihak-pihak berelasi semakin banyak ditemukan terlebih lagi setelah krisis ekonomi di Asia tahun 1997 dan 1998. Krisis tersebut mengungkap banyaknya perusahaan yang bangkrut terutama dengan karakteristik bisnis antar perusahaan keluarga, mereka didorong untuk meningkatkan profitabilitas dengan melakukan pinjaman secara masif. Seiring jatuhnya mata uang negara, perusahaan tak mampu memenuhi kewajibannya dan mengakibatkan kebangkrutan di penjuru Asia. Pemegang saham minoritas dirugikan karena perusahaan mencoba mengambil alih kekayaan perusahaan untuk memenuhi pinjaman, pemindahan dana, dan pembelian aset.

Penelitian Gordon, Henry, dan Palia (2004) menemukan dua pandangan dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap pengaruhnya pada kinerja perusahaan. Pandangan pertama adalah transaksi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang kepentingan mayoritas dan minoritas. Pandangan kedua adalah transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan perusahaan dan berdasarkan alasan ekonomi yang kuat. Disatu sisi, transaksi pihak-pihak

berelasi membuka kesempatan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara mengekspropriasi pemegang kepentingan minoritas. Sebaliknya transaksi ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi dengan biaya yang rendah. Dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Cheung, Rau dan Stouraitis, 2006) mengungkapkan bahwa perusahaan akan cenderung memanfaatkan transaksi pihak-pihak berelasi untuk melakukan manajemen laba. Dalam penelitian Johnson *et al.* (2000) menemukan bahwa pemangku kepentingan mayoritas dapat mengaproproasi kekayaan kepentingan minoritas dengan berbagai cara, yaitu mendapatkan tambahan kas dengan menjual aset, barang, atau jasa kepada perusahaan pihak-pihak berelasi pada harga dibawah harga pasar, mendapatkan pinjaman dengan syarat yang menguntungkan, memindahkan aset antara perusahaan pengendali dan non pengendali dan yang paling buruk adalah mengambil alih kepentingan pihak minoritas.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagian besar ditemukan di negara berkembang. Dari penelitian yang dilakukan di 9 negara Asia Timur yang melibatkan 2.980 perusahaan ditemukan bahwa lebih dari setengah dikendalikan oleh satu pemegang saham (Claessens *et al.*, 1999). Penelitian lain yang dilakukan oleh Johnson *et al.* (2000) membuktikan bahwa, di negara berkembang, pemilik saham mayoritas terlibat dalam praktek ekspropriasi atau *tunneling* yang dilakukan terhadap pemegang saham minoritas. Penyalahgunaan transaksi pihak-pihak berelasi juga diungkapkan oleh penelitian Cheung *et al.* (2008), perusahaan *listing* di China melakukan transaksi pihak-pihak berelasi untuk memperoleh keuntungan

pihak pengendali. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan perusahaan keluarga. Yeh *et al.* (2012) juga menemukan perusahaan *listing* di Taiwan melakukan berbagai tipe transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Munir dan Gul (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan *listing* di Malaysia didominasi oleh perusahaan keluarga dan memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi pihak-pihak berelasi. Penelitian tersebut membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki kesempatan untuk mengekspropriasi kepentingan minoritas dan berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jonchi Shyu (2011) menunjukkan adanya hubungan antara kinerja perusahaan dengan kepemilikan keluarga, yaitu semakin tinggi kepemilikan keluarga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Disebutkan pula kepemilikan keluarga memberikan keuntungan dengan ditunjukan peningkatan ROA. Penelitian lain juga menyatakan hal yang sama yaitu keuntungan dari kepemilikan keluarga membantu perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan bukan perusahaan keluarga. (Anderson dan Reeb, 2003; Villalonga dan Amit, 2006; Maury, 2006; Siregar dan Utama, 2008).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Claessens, Djankov, dan Lang, 2000; Zhuang *et al.*, 2000; Gunarsih, 2003) dan mayoritas dari perusahaan *listing* dikendalikan oleh kelompok bisnis keluarga. Karakteristik lain dari struktur kepemilikan terkonsentrasi adalah apabila dalam perusahaan terdapat satu atau lebih pemegang saham terbesar sebagai pemegang saham pengendali yang

mempunyai minimal 20% saham (peraturan Bapepam no. IX.H.1). Oleh karena struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, transaksi dengan pihak-pihak berelasi ditemukan di sebagian besar perusahaan di Indonesia. Penyalahgunaan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang ditemukan di banyak negara berkembang juga dimungkinkan terjadi di Indonesia.

Isu transaksi pihak-pihak berelasi berkaitan dengan penerapan *corporate governance* dikarenakan masalah asimetri informasi antara pihak pengendali dan non pengendali. Pihak non pengendali yang merupakan pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung dan terus menerus untuk menilai apakah terdapat transaksi yang tidak efisien. Keberadaan *corporate governance* dibutuhkan untuk membantu pihak non pengendali mengontrol aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengendali.

Transaksi pihak-pihak berelasi yang marak di temukan di negara berkembang disebabkan karena di negara tersebut belum diatur secara jelas dan tegas mengenai transaksi pihak-pihak berelasi, regulasi pemerintah masih lemah sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. *Good corporate governance* dipercaya dapat menekan aktivitas *tunneling* karena adanya pengawasan yang efektif. Pengawasan ini dibagi menjadi internal dan eksternal. Dewan komisaris dapat menekan aktivitas *tunneling* melalui otorisasi transaksi-transaksi yang dinilai tidak wajar dan material. Mekanisme pengawasan eksternal melibatkan komite audit independen yang menguji kesesuaian transaksi dengan standar yang ada. Berdasarkan penelitian Chien dan Hsu (2010) mendapatkan bukti terdapat hubungan yang positif dari dampak dari mekanisme *good corporate*

governance antara transaksi pihak berelasi dengan kinerja perusahaan. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat membawa transaksi pihak-pihak berelasi menjadi transaksi yang efisien seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan.

Penelitian di Indonesia mengenai dampak *good corporate governance* dari hubungan transaksi pihak-pihak berelasi dan kinerja juga menemukan hasil yang berbeda. Harto (2013) mengungkapkan bahwa peran *good corporate governance* tidak efektif mengatasi masalah apropriasi dalam bisnis yang terkonsentrasi. Di sisi lain penelitian oleh Brundy dan Siswantaya (2014) berhasil menemukan bahwa pengawasan internal, pengawasan oleh kreditur, dan pengawasan oleh auditor independen dari sudut pandang kompetensi berpengaruh terhadap aktivitas *tunneling*. Dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di Indonesia sebelumnya hanya menguji adanya aktivitas manajemen laba dalam melakukan transaksi pihak-pihak berelasi, dan menguji keefektifan mekanisme *good corporate governance* tanpa melihat dampak terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pula bahwa terdapat inkonsistensi apakah transaksi pihak-pihak berelasi yang dilakukan antar perusahaan keluarga maupun perusahaan kepemilikan asing dilakukan sebagai sarana manajemen laba dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Belum jelas pula apakah dengan adanya *good corporate governance* perusahaan dapat menekan penyalahgunaan transaksi pihak-pihak berelasi dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencapai transaksi yang efisien. Penelitian terdahulu di Indonesia masih jarang ditemukan mengenai pengaruh transaksi pihak-pihak

berelasi di Indonesia terhadap kinerja perusahaan. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Fransiska dan Lestari (2015) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara transaksi pihak berelasi dengan kinerja perusahaan di Indonesia namun variabel yang digunakan dalam transaksi hanya penjualan dan pembelian saja dengan tidak membuktikan apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan”.

1.2. Perumusan Masalah

Didasarkan pada teori agensi, kondisi manajer dan komisaris yang tidak terpisah akan menimbulkan konflik kepentingan. Manajer memungkinkan melakukan kebijakan transaksi pihak-pihak berelasi untuk memindahkan kekayaan atau keuntungan perusahaan kepada mereka. Transaksi tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspropriasi pemegang saham minoritas. Melalui transaksi tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan salah satu pihak. Terjadi perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan mayoritas dan minoritas menyebabkan transaksi tersebut dilakukan bukan berdasarkan pengetahuan ekonomi yang akurat. Tujuan dari transaksi yang bukan berdasarkan kebutuhan perusahaan ini menjadikan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak efisien dan menurunkan kemampuan kinerja perusahaan. Penelitian Wong (2015), menemukan bahwa dari

90 perusahaan *listing* di China, kebanyakan dari mereka melakukan manajemen laba dalam transaksi pihak-pihak berelasi dan akibatnya kinerja perusahaan mereka menjadi buruk.

Kehadiran *corporate governance* sendiri diharapkan mampu menekan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Transaksi pihak berelasi dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan terkendali lalu dapat mengubah motivasi aktivitas tersebut dari “*conflict of interest*” menjadi “*efficiency transaction*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah interaksi antara transaksi pihak berelasi dan *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja. Secara rinci, tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kinerja perusahaan

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi pengaruh antara transaksi pihak berelasi dan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantara berikut ini.

1.4.1. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan transaksi pihak berelasi.

1.4.2. Bagi Pengguna Informasi (Investor dan Kreditor)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dampak transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan.

1.4.3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan masukan regulator dalam mengatur regulasi mengenai transaksi pihak berelasi di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran.

Pada bab II, yaitu tinjauan pustaka menjelaskan mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu, dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bab III, yaitu metode penelitian menjelaskan mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel. Pada bab IV, yaitu hasil analisis data dan pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. Bab yang terakhir, yaitu bab V mengenai kesimpulan dan saran menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan, saran, dan implikasi yang ditemukan.